

## **ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM**

**Riska Wulandari<sup>1</sup>**

riskawulandari241@gmail.com

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

**Baiq Anggun Hilendri Lestari<sup>2</sup>**

hilendria@unram.ac.id

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

**Adithya Bayu Suryantara<sup>3</sup>**

adhityabayus@unram.ac.id

<sup>3</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, dan rasio solvabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram berdasarkan: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada pola hubungan konsultatif karena berada pada rentang rasio 25% - 50%. (2) Rasio Desentralisasi Fiskal dikatakan sangat rendah karena berada pada rentang 20% - 29,99%. (3) Rasio Efektivitas PAD dikatakan efektif karena mencapai rasio lebih dari 100%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berfluktuasi karena rasio yang dicapai mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun. (5) Rasio Keserasian Belanja dikatakan kurang baik karena belanja operasi lebih tinggi daripada belanja modal. (6) Rasio Pertumbuhan dikatakan tidak baik karena berada pada rentang 0% - 25%. (7) Rasio Solvabilitas dikatakan baik karena melebihi standar keberhasilan menurut Mahmudi (2019) yaitu 2:1.

**Kata Kunci:** Rasio keuangan, Pemerintah Daerah.

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the financial performance of the Regional Government of Mataram City in terms of the ratio of regional financial independence, ratio of fiscal decentralization, effectiveness of Own-Source Revenue (PAD) ratio, ratio of regional financial efficiency, ratio of expenditure harmony, growth ratio, and solvency ratio. This type of research is descriptive research with a quantitative approach. Data collection method used is documentation and data analysis method used is descriptive quantitative. The results of this study indicate that the financial performance of the Mataram City Government is based on: (1) The Regional Financial Independence Ratio is in a consultative relationship pattern because it is in the ratio range of 25% - 50%. (2) The Fiscal Decentralization Ratio is said to be very low because it is in the range of 20% - 29.99%. (3) Effectiveness of Own-Source Revenue (PAD) ratio is said to be effective because it reaches a ratio of more than 100%. (4) Regional Financial Efficiency Ratio fluctuates because the ratio achieved increases and decreases every year. (5) Expenditure Harmony Ratio is said to be unfavorable because operating expenditure is higher than capital expenditure. (6) The Growth Ratio is said to be not good because it is in the range of 0% - 25%. (7) The solvency ratio is said to be good because it exceeds the standard of success according to Mahmudi (2019) is 2:1.

**Keywords:** *Financial ratios, local Government*

## PENDAHULUAN

Sebelum adanya otonomi daerah, hampir sebagian daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia mendapatkan sumber pendapatan melalui Dana Bagi Hasil yang berasal dari Pemerintah Pusat (Melmambessy, 2022). Namun, otonomi daerah memberikan kebebasan dalam mengelola dan meningkatkan sumber pendapatan yang dapat menambah penerimaan daerah demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Kemudian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang lebih besar (Mahmudi, 2019).

Tingkat kemandirian yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat melalui dana transfer. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dengan tingkat ketergantungan yang kecil kepada pemerintah pusat melalui dana transfer. Dengan demikian pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, karena PAD yang tinggi mencerminkan kemandirian suatu daerah (Syahrial dan Sotuyo, 2014).

Namun, pada kenyataannya bahwa setiap tahun pemerintah menganggarkan dana transfer ke daerah yang diberikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2017, transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp. 673,7 triliun dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 706,1 Triliun pada tahun 2018. transfer ke daerah kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp. 756,77 triliun. Demikian juga pada tahun 2020, transfer ke daerah kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 784,94 triliun. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 723,48 triliun.

Sebagaimana yang dikatakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung kepada transfer ke daerah. Ketergantungan tersebut disebabkan minimnya kontribusi PAD. Di tingkat provinsi, PAD dalam bentuk pajak hanya mampu berkontribusi sebesar 37,7% terhadap total anggaran, sedangkan di tingkat kabupaten/kota PAD dalam bentuk pajak hanya mampu berkontribusi sebesar 6,6% (Cnnindonesia.com, 2017).

Seperti halnya yang terjadi pada Pemerintah Kota Mataram, dimana berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Mataram, kontribusi PAD masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Pendapatan Daerah Kota Mataram masih didominasi oleh Pendapatan Transfer. Kemudian, Pemerintah Kota Mataram juga masih memprioritaskan alokasi dana belanja daerah untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Melmambessy (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan sangat baik karena Pemerintah Kota Jayapura sangat efektif dalam merealisasikan PAD. Walaupun demikian, ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat masih tinggi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syukur (2021) menunjukkan bahwa Kabupaten Maros kurang efektif dalam merealisasikan PAD. Setiap tahun realisasi PAD tidak bisa mencapai target yang dianggarkan. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan PAD tergolong tidak baik. Kemudian penelitian Deswira (2022) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Tanah Datar sangat rendah sehingga masih sangat bergantung pada dana transfer. Pertumbuhan PAD juga masih berada pada kategori rendah sekali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, dan rasio solvabilitas. Adapun pembaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

terletak pada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori *New Public Management* (NPM), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan *Stakeholder Theory*. Selain itu, penelitian ini menggunakan rasio solvabilitas sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan rasio tersebut.

## TINJAUAN LITERATUR

### *New Public Management* (NPM)

Hood (1995) mengatakan *New Public Management* (NPM) merupakan sebuah konsep manajemen yang memperkenalkan bahwa praktik manajemen organisasi sektor swasta lebih baik daripada sektor publik. *New Public Management* merupakan konsep manajemen yang menerapkan praktik sektor kerja swasta ke dalam sektor kerja publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja sektor publik sehingga menjadi kinerja yang lebih baik.

### Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pada intinya otonomi daerah merupakan hak dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

### Rasio Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio ini digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun.

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri aktivitas atau kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim & Kusufi, 2014). Berikut ini merupakan rumus rasio kemandirian keuangan daerah.

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penilaian kemandirian keuangan daerah.

**Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan Daerah	Persentase Kemandirian	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Fathah (2017)

## 2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah (Susilawati et al., 2018). Apabila PAD semakin tinggi, maka otomatis pendapatan daerah juga semakin tinggi dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi semakin tinggi. Berikut ini merupakan rumus rasio desentralisasi fiskal.

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daaerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat desentralisasi fiskal pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka diperlukan kriteria penilaian berikut:

**Tabel 2. Kriteria Desentralisasi Fiskal**

Presentase Desentralisasi	Kriteria Desentralisasi
20% – 29,99%	Sangat Rendah
30% – 39,99%	Rendah
40% – 49,99%	Sedang
50% – 59,99%	Tinggi
≥60%	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 38 Tahun 2020

## 3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah dianggarkan dibandingkan dengan jumlah target/anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan rumus rasio efektivitas PAD.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria Efektivitas Daerah**

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
<100%	Tidak Efektif
100%	Efektivitas Berimbang
>100%	Efektif

Sumber: Fathah, 2017

## 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi ini menunjukkan perbandingan antara besarnya belanja daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima (Fathah, 2017). Berikut ini merupakan rumus rasio efisiensi keuangan daerah.

$$\text{Rumus Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun dalam melakukan pengukuran kinerja terdapat kriteria efisiensi keuangan daerah. Secara umum, nilai efisiensi keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut.

**Tabel 4. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
<100%	Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Fathah (2017)

### 5. Rasio Keceragaman Belanja

Rasio keceragaman belanja menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Terdapat dua perhitungan dalam rasio keceragaman ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Berikut ini merupakan rumus rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Syukur (2021) memberikan barometer keceragaman belanja sebagai berikut.

**Tabel 5. Kriteria Keceragaman Belanja**

Perbandingan	Kriteria Keceragaman
Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Modal	Kurang Baik
Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Modal	Cukup Baik
Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Modal	Baik – Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Syukur (2021)

### 6. Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2019) analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Jadi, rasio pertumbuhan menggambarkan bagaimana pertumbuhan pendapatan dari satu periode ke periode selanjutnya apakah mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Berikut ini merupakan rumus rasio pertumbuhan.

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Th}_t - \text{PAD Th}_{t-1}}{\text{PAD Th}_{t-1}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Syukur (2021) menetapkan barometer rasio pertumbuhan sebagai berikut.

**Tabel 6. Kriteria Rasio Pertumbuhan PAD**

Persentase	Kriteria Petumbuhan
76% - 100%	Baik
51% - 75%	Cukup Baik
26% - 50%	Kurang Baik
0% - 25%	Tidak Baik

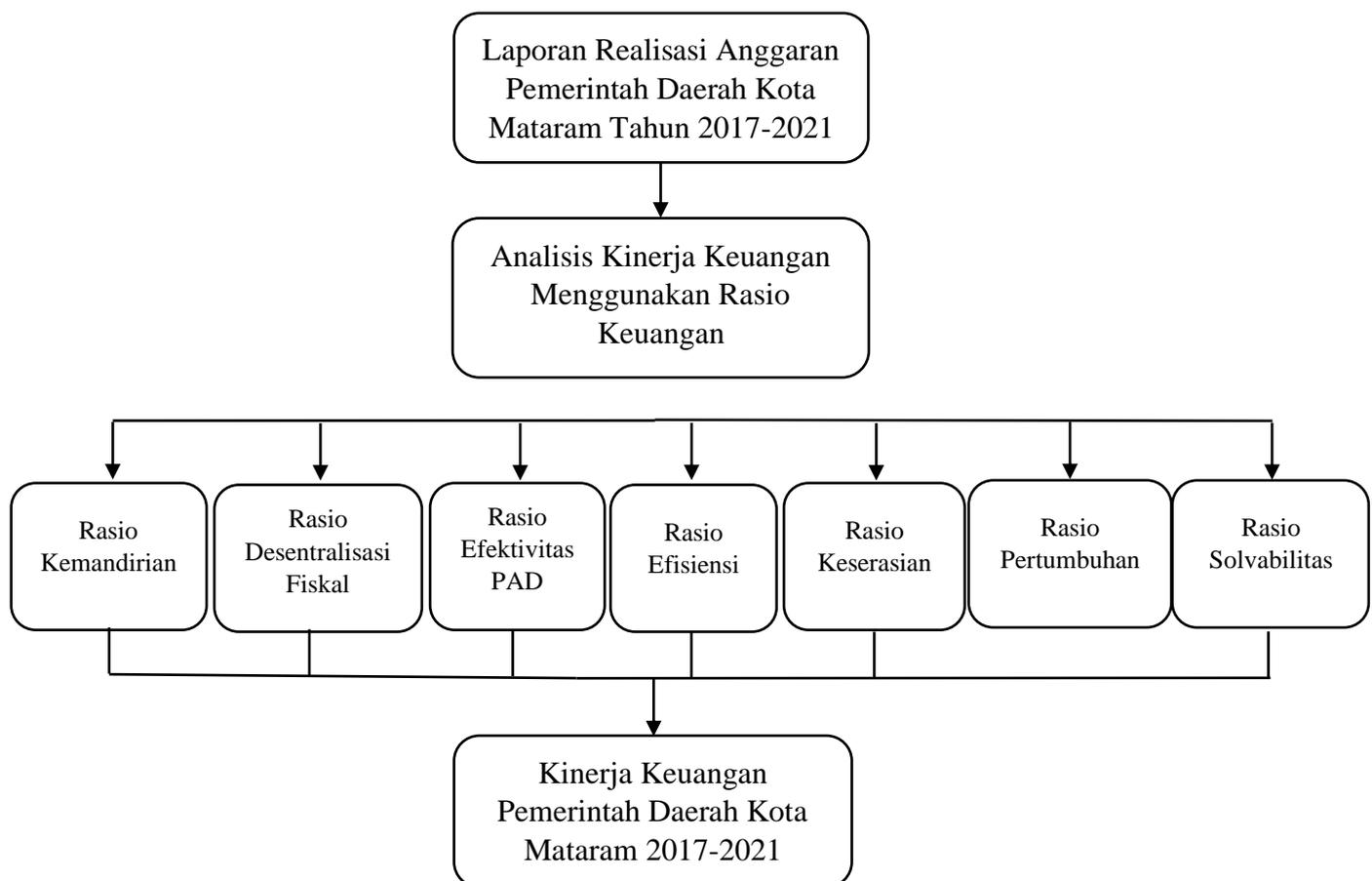
Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Syukur (2021)

### 7. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang bermanfaat untuk melihat sampai mana kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek (Mahmudi, 2019). Berikut ini merupakan rumus rasio solvabilitas.

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}}$$

Mahmudi (2019) mengatakan bahwa nilai standar keberhasilan rasio solvabilitas adalah 2:1. Perbandingan tersebut berarti sebesar Rp 2 total aktiva mampu menjamin hutang sebesar Rp 1 secara keseluruhan.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menggunakan rasio keuangan.

**Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Mataram di Bidang Akuntansi yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto No. 1, Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83123

**Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

**Metode Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dan aktivitas pemerintahan. Berikut ini hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

**Tabel 7. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2017	386,958,232,873.50	1,020,544,460,849.00	37.92%	Konsultatif
2018	358,825,822,208.30	1,003,759,977,412.00	35.75%	Konsultatif
2019	373,951,422,339.15	1,036,597,510,641.00	36.07%	Konsultatif
2020	363,165,361,010.56	971,125,111,760.00	37.40%	Konsultatif
2021	392,556,124,241.49	970,243,717,002.00	40.46%	Konsultatif

Sumber: BKD Kota Mataram (data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pendapatan transfer dari pihak eksternal seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih tinggi, terutama transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi sehingga pola hubungannya termasuk pola hubungan konsultatif, dimana peran pemerintah pusat masih tinggi. Diawali pada tahun 2017 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 37,92% dan menurun pada tahun 2018 menjadi 35,75%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 36,07%, namun kembali mengalami penurunan menjadi 37,40% pada tahun 2020. Kemudian rasio kemandirian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 40,46%.

Peningkatan yang terjadi pada rasio kemandirian ini disebabkan meningkatnya PAD terutama pada tahun 2019 dan 2021. Peningkatan PAD sebagian besar berasal dari Pajak

Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Adapun hasil pemungutan pajak daerah dengan perolehan yang tinggi berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kemudian tingginya Lain-Lain PAD Yang Sah didominasi berasal dari Pendapatan BLUD. Selanjutnya PAD ini juga bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Sah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram berada pada pola hubungan konsultatif, artinya bahwa Kota Mataram dianggap sudah sedikit mampu dalam membiayai sendiri kegiatan dan aktivitas pemerintahannya. Namun, meskipun sudah sedikit mampu dalam membiayai sendiri pemerintahannya tidak dipungkiri bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari rasio yang dicapai berada pada interval 25% - 50%.

## 2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Adapun hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal sebagai berikut.

**Tabel 8. Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Desentralisasi Fiskal	Kriteria
2017	386,958,232,873.50	1,424,072,893,722.50	27.17%	Sangat Rendah
2018	358,825,822,208.30	1,418,432,870,483.30	25.30%	Sangat Rendah
2019	373,951,422,339.15	1,462,795,712,980.15	25.56%	Sangat Rendah
2020	363,165,361,010.56	1,396,009,615,374.56	26.01%	Sangat Rendah
2021	392,556,124,241.49	1,419,886,218,959.26	27.65%	Sangat Rendah

Sumber: BKD Kota Mataram (data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari persentase rasio desentralisasi fiskal yang dicapai masih sangat rendah pada tahun 2017 mencapai 27,17%. Kemudian nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 25,30%, namun mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 menjadi 25,56%. Rasio desentralisasi fiskal kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 26,01%. Demikian halnya pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 27,65%.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram dilihat dari rasio desentralisasi fiskal berada pada kriteria sangat rendah. Artinya bahwa Pemerintah Kota Mataram belum mampu dalam melaksanakan desentralisasi dengan baik disebabkan kontribusi PAD Kota Mataram masih sangat rendah terhadap pendapatan daerah. Terlihat dari rasio yang dicapai berada pada interval 20% - 29,99%.

## 3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD.

**Tabel 9. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria
2017	386,958,232,873.50	367,503,589,415.00	105.29%	Efektif
2018	358,825,822,208.30	354,697,095,359.00	101.16%	Efektif
2019	373,951,422,339.15	372,928,500,000.00	100.27%	Efektif
2020	363,165,361,010.56	306,337,291,261.15	118.55%	Efektif
2021	392,556,124,241.49	370,608,032,419.00	105.92%	Efektif

Sumber: BKD Kota Mataram (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD selalu melebihi yang dianggarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rasio efektivitas PAD yang dicapai sebesar 105,29%. Pada tahun 2018 mencapai persentase 101,16%. Kemudian pada tahun 2019 rasio yang dicapai sebesar 100,27%. Pada tahun 2020 rasio yang dicapai sebesar 118,55%. Sedangkan pada tahun 2021 rasio yang dicapai sebesar 105,92%. Meskipun mengalami fluktuasi, namun capaian rasio masih melebihi 100% setiap tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram berada pada kriteria efektif. Artinya bahwa Pemerintah Kota Mataram mampu dalam merealisasikan PAD melebihi yang dianggarkan setiap tahun. Hal ini dikarenakan sumber-sumber PAD seperti Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah selalu memperoleh realisasi melebihi yang telah dianggarkan.

#### 4. Rasio efisiensi keuangan daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan daerah. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah.

**Tabel 10. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
2017	1,411,494,435,045.26	1,424,072,893,722.50	99.12%	Efisien
2018	1,434,640,291,212.39	1,418,432,870,483.30	101.14%	Tidak Efisien
2019	1,446,975,861,771.14	1,462,795,712,980.15	98.92%	Efisien
2020	1,456,351,203,197.18	1,396,009,615,374.56	104.32%	Tidak Efisien
2021	1,382,352,867,746.57	1,419,886,218,959.26	97.36%	Efisien

Sumber; BKD Kota Mataram (data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja sangat tinggi dan selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2021. Kemudian rasio efisiensi yang dicapai mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rasio efisiensi keuangan daerah yang dicapai 99,12% dan mengalami peningkatan menjadi 101,14% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 rasio efisiensi yang dicapai mengalami penurunan menjadi 98,92%. Kemudian pada tahun 2020 rasio yang dicapai kembali mengalami peningkatan menjadi 104,32%. Sedangkan pada tahun 2021 rasio yang dicapai kembali mengalami penurunan menjadi 97,36%

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota Mataram dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 dan 2020 Pemerintah Kota Mataram berada pada kriteria tidak efisien dikarenakan jumlah belanja daerah melebihi jumlah pendapatan daerah. Pemerintah Kota Mataram masih belum bisa menekan jumlah belanja daerahnya. Tingginya belanja daerah dikarenakan tingginya alokasi untuk menjadi operasi. Kemudian pada tahun 2017, 2019, dan 2021 Pemerintah Kota Mataram berada pada kriteria efisien dikarenakan pemerintah daerah mampu dalam menekan jumlah belanja daerahnya pada tahun tersebut.

## 5. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Terdapat dua cara perhitungan rasio keserasian belanja, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio keserasian belanja.

**Tabel 11. Perhitungan Rasio Belanja Operasi**

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi
2017	1,074,540,810,449.36	1,411,494,435,045.26	76.13%
2018	1,114,540,985,292.04	1,434,640,291,212.39	77.69%
2019	1,115,360,714,808.67	1,446,975,861,771.14	77.08%
2020	1,113,409,266,516.18	1,456,351,203,197.18	76.45%
2021	1,184,115,032,150.37	1,382,352,867,746.57	85.66%

Sumber: BKD Kota Mataram (data diolah)

**Tabel 12. Perhitungan Rasio Belanja Modal**

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi
2017	334,493,514,237.90	1,411,494,435,045.26	23.70%
2018	316,822,225,186.35	1,434,640,291,212.39	22.08%
2019	331,560,943,664.74	1,446,975,861,771.14	22.91%
2020	209,066,411,335.00	1,456,351,203,197.18	14.36%
2021	185,546,615,534.20	1,382,352,867,746.57	13.42%

Sumber: BKD Kota Mataram (data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi rasio keserasian belanja Kota Mataram. Terlihat bahwa nilai rasio belanja operasi sangat tinggi jika dibandingkan dengan nilai rasio belanja modal. Hal ini disebabkan jumlah sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi. Tingginya belanja operasi ini disebabkan tingginya pengeluaran yang digunakan untuk belanja pegawai dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan PNS. Selain belanja pegawai, terdapat belanja barang dan jasa yang juga hampir setara dengan belanja pegawai. Selanjutnya terdapat belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, belanja operasi sangat tinggi.

Berbeda dengan belanja operasi, belanja modal jauh lebih rendah. Terjadi penurunan jumlah belanja modal pada tahun 2018, 2020, dan 2021. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018. Sementara penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan menurunnya jumlah Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Kemudian menurunnya jumlah belanja modal pada tahun 2021 disebabkan terjadinya penurunan pada realisasi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2017-2021 berdasarkan rasio keserasian belanja adalah kurang baik. Artinya bahwa Pemerintah Kota Mataram masih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah. Jumlah belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja modal.

## 6. Rasio Pertumbuhan

Perhitungan rasio pertumbuhan dilakukan untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan pendapatan dari satu periode ke periode selanjutnya apakah mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Berikut ini merupakan hasil perhitungan pertumbuhan.

**Tabel 13. Perhitungan Rasio Pertumbuhan**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Kriteria
2017	386,958,232,873.50	-	-
2018	358,825,822,208.30	-7.27%	-
2019	373,951,422,339.15	4.22%	Tidak Baik
2020	363,165,361,010.56	-2.88%	-
2021	392,556,124,241.49	8.09%	Tidak Baik

Sumber: BKD Kota Mataram (data diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa PAD Kota Mataram mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 rasio pertumbuhan PAD yang dicapai sebesar -7,27% dari tahun sebelumnya dan menjadi pertumbuhan paling rendah. Kemudian pada tahun 2019 rasio pertumbuhan PAD yang dicapai mengalami peningkatan menjadi 4,22%, namun mengalami penurunan menjadi pertumbuhan negatif sebesar -2,88% pada tahun

2020. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhan PAD kembali mengalami peningkatan menjadi 8,09% dan menjadi nilai tertinggi diantara tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2018 dan 2020 terjadi pertumbuhan negatif.

Peningkatan dan penurunan rasio ini disebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan pada sumber-sumber pendapatan asli daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Mataram, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dari keempat sumber penerimaan PAD tersebut, Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan penyumbang PAD yang besar. Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah mendominasi penerimaan PAD Kota Mataram. Penurunan rasio pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan terjadi penurunan yang besar pada Lain-Lain PAD Yang Sah. Sedangkan penurunan rasio pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan terjadi penurunan yang besar pada Pajak Daerah dan penurunan pada Retribusi Daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Mataram dilihat dari rasio termasuk dalam kriteria tidak baik. Pada tahun 2018 dan 2020 mengalami pertumbuhan negatif, yaitu PAD tahun tersebut tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2019 dan 2021 mengalami pertumbuhan positif, namun tidak begitu signifikan karena peningkatannya terbilang sangat rendah. Artinya bahwa pertumbuhan yang terjadi terhadap PAD Kota Mataram sangat rendah.

## 7. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau melunasi hutang atau kewajibannya dengan menggunakan aset yang dimiliki. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio solvabilitas.

**Tabel 14. Perhitungan Rasio Solvabilitas**

Tahun	Total Aktiva (Rp)	Total Hutang (Rp)	Rasio Solvabilitas
2017	2.909.630.301.366,46	48.473.758.011,14	60,02
2018	3.111.647.452.541,33	52.072.969.560,50	59,76
2019	3.356.080.248.167,48	69.601.445.086,50	48,22
2020	3.386.603.850.080,12	69.423.839.722,50	48,78
2021	3.499.251.011.186,62	81.715.546.225,50	42,82

Sumber: BKD Kota Mataram (data diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas pada tabel 4.8, rasio solvabilitas Pemerintah Kota Mataram mengalami penurunan setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2017 perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban Pemerintah Kota Mataram adalah 60,02:1. Artinya bahwa sebesar Rp. 60,02 jumlah aktiva yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram mampu menjamin sebesar Rp. 1 seluruh kewajiban. Kemudian pada tahun 2018 perbandingan rasio solvabilitas mengalami penurunan menjadi 59,76:1 yang berarti bahwa Rp. 59,76 jumlah aktiva mampu menjamin Rp. 1 jumlah kewajiban secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2019, perbandingan rasio solvabilitas yang dicapai kembali mengalami penurunan menjadi 48,22:1, artinya bahwa sebanyak Rp. 48,22 jumlah aktiva mampu menjamin

sebesar Rp. 1 seluruh kewajiban. Kemudian pada tahun 2020 perbandingan rasio solvabilitas mengalami sedikit peningkatan menjadi 48,78:1, artinya bahwa sebanyak Rp. 48,78 jumlah aktiva mampu menjamin Rp. 1 jumlah kewajiban. Hingga pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 42,82:1, artinya bahwa sebanyak Rp. 42,82 jumlah aktiva mampu menjamin sebesar Rp. 1 jumlah kewajiban keseluruhan.

Jika melihat penurunan pada rasio solvabilitas yang terjadi tidak menimbulkan risiko solvabilitas. Pemerintah Kota Mataram masih dinilai solvabel dan mampu untuk memenuhi atau melunasi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek terlihat dari perbandingan rasio solvabilitas yang dicapai telah mencapai angka standar keberhasilan dimana menurut Mahmudi (2019) yaitu sebesar 2:1. Artinya bahwa kinerja Pemerintah Kota Mataram jika dilihat dari rasio solvabilitas tergolong baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram sudah mulai sedikit mandiri dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintahannya. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang terbilang masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer sehingga menyebabkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi masih sangat rendah. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Mataram mampu merealisasikan PAD melebihi yang dianggarkan terlihat dari rasio efektivitas yang dicapai melebihi 100%. Namun, keefisienan Pemerintah Kota Mataram dalam merealisasikan pendapatan daerah masih berfluktuasi dikarenakan beberapa tahun belum bisa untuk menekan jumlah belanja daerah.

Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram masih memprioritaskan belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal. Pertumbuhan PAD pun tidak baik. Namun, Pemerintah Kota Mataram terbilang mampu dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset yang dimiliki terlihat dari rasio solvabilitas yang dicapai melebihi standar keberhasilan menurut Mahmudi (2019) yaitu 2:1.

## **REFERENSI**

- Cnnindonesia.com. (2017). *Sri Mulyani Keluhkan Pemda Terlalu Bergantung pada APBN*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171206135433-532-260497/sri-mulyani-keluhkan-pemda-terlalu-bergantung-pada-apbn>
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72–88. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Halim, A., & Muhammad Abdul Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Hood, C. (1995). The “New Public Management” in The 1980s: Variations on A Theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 93–109. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0001-W](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W)
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.

- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13. [ejurnal.stie-portnumbay.ac.id](http://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang *Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah*.
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Syahrial dan Sotuyo. (2014). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5).
- Syukur, D. P. et al. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 152–165.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.